

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian mengenai “Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Barat Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Dalam Pemilihan Umum Serentak 2019”, strategi politik yang dilakukan oleh KPU kota administrasi Jakarta Barat sangat masif dilakukan dan menysar beragam segmentasi basis masyarakat.

Strategi ofensif yang dilakukan KPU kota administrasi Jakarta Barat terbagi menjadi dua, yaitu strategi perluasan pasar dan strategi menembus pasar. Strategi perluasan pasar yang dilakukan KPU kota administrasi Jakarta Barat dapat melalui program relawan demokrasi menysar target 10 basis pemilih (basis pemilih keluarga, pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, penyandang disabilitas, pemilih berkebutuhan khusus, kaum marjinal, komunitas, keagamaan, warga internet/netizen) dan juga melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang membantu mensosialisasikan program-program KPU dan juga fungsi tugas KPU, dan apa arti pentingnya pemilu kepada masyarakat. Serta program kegiatan KPU lainnya yang dilaksanakan selama tahapan pemilu serentak tahun 2019.

Dalam penerapan Strategi menembus pasar KPU kota administrasi Jakarta Barat melakukan optimalisasi pemilih yang berada pada wilayah-wilayah rawan dengan tingkat partisipasi rendah. Kemudian, KPU kota administrasi Jakarta Barat juga meningkatkan sosialisasi terhadap segmentasi pemilih pemula dan juga segmentasi lainnya, termasuk segmentasi masyarakat yang volumenya kecil, seperti orang yang terkena gangguan jiwa, yang memang secara hukum mereka dimungkinkan untuk menggunakan hak pilih. Jumlahnya memang tidak

banyak dibanding dengan persentase pemilih secara keseluruhan, akan tetapi secara politik itu menjadi hak mereka dan tidak boleh dibuang, harus tetap dijelaskan kepada mereka, mengenai hak mereka untuk menggunakan hak pilih.

Strategi defensif yang dilakukan KPU kota administrasi Jakarta Barat yang relevan dengan penyelenggara pemilu adalah strategi mempertahankan pasar. Dalam strategi ini dapat diterapkan pihak penyelenggara pemilu melalui program-program yang selama ini sudah berjalan dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat atau calon pemilih. KPU kota administrasi Jakarta Barat selalu melakukan check and re-check terhadap kader maupun kualitas SDM yang dimiliki oleh KPU kota administrasi Jakarta Barat, serta memberikan semacam bimbingan teknis (bimtek), upgrading, training, dan segala macam pelatihan supaya kader-kader dan juga SDM yang ada lebih paham terhadap materi terkait sosialisasi kepemiluan, termasuk peningkatan kemampuan berbasis IT (Informasi dan Teknologi). Kemudian, KPU kota administrasi Jakarta Barat juga terus menjalankan program pemanfaatan media sosial, dan juga website sebagai sarana sosialisasi tahapan pemilu kepada masyarakat. Selain itu, KPU kota administrasi Jakarta Barat juga tetap menjalin hubungan baik dengan masyarakat lewat pembentukan grup media sosial. Termasuk dengan grup mantan penyelenggara pemilu ad hoc (PPK dan PPS), walaupun mereka sudah tidak menjadi penyelenggara saat ini.

Pada pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 di kota administrasi Jakarta Barat, terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan strategi KPU kota administrasi Jakarta Barat untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu serentak tahun 2019. Seperti terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan KPU kota administrasi Jakarta Barat dan juga minimnya anggaran yang dimiliki oleh KPU kota administrasi Jakarta Barat. Selain itu, banyaknya pemberitaan hoax terkait pemilu juga menjadi salah satu faktor yang menghambat strategi KPU kota administrasi Jakarta Barat. Dan adanya peran stakeholder khususnya pemerintahan, TNI/Polri, dan lain

sebagainya yang turut mendukung kegiatan sosialisasi KPU kota administrasi Jakarta Barat untuk terjun langsung ke masyarakat menjadi faktor penting yang mendukung strategi KPU kota administrasi Jakarta Barat untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu serentak tahun 2019.

V.2 Saran

Dari hasil penelitian ini dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut

V.2.1 Saran Praktis

1. Kepada Komisi Penyelenggara Pemilu (KPU) selaku penyelenggara pemilihan diharapkan dapat membuka peluang menghadirkan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu, terutama penguatan bimbingan teknis kader Relawan Demokrasi, PPK, PPS yang terjun langsung kepada masyarakat untuk menjadikan masyarakat sebagai pemilih cerdas, serta penguatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dalam lingkup SDM KPU maupun kader-kader KPU yang nantinya diharapkan dapat mempermudah kinerja KPU sehingga akan menjadi semakin efektif, serta pengembangan pemanfaatan media sosial, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi dan juga edukasi terkait kepemiluan melalui platform media sosial yang dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
2. Kepada Lembaga non pemerintah yang berfokus kepada kepemiluan untuk terus mengawal dan mendorong terciptanya pemilu yang demokratis di Indonesia.

V.2.2 Saran Teoritis

1. Kepada peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat melakukan penelitian lebih mendalam terkait penerapan strategi politik yang dilakukan oleh KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum untuk dapat meningkatkan partisipasi pemilih dalam suatu pemilihan, karena pada pemilihan berikutnya akan bersifat lebih kompleks, sehingga

tantangan yang harus dihadapi oleh KPU kian bertambah dan juga dinamika masyarakat yang kian dinamis, serta semakin berkembangnya penggunaan teknologi informasi di masyarakat.